

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan, dkk. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI: Jakarta, 2018.
- Ardiles, dkk. *Akuntabilitas Dana Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Utara*. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara: Sulawesi Utara, 1998.
- Ardianto, Hendra Try. "Uang dan Partai Politik: Urgensi Mengatur Keuangan Parpol dan Kandidat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 7.
- Assidiq, Fajar. "Menguatnya Perkembangan Salafisme dan Dominasi Ekonomi Kelompok Bisnis Arab di Banyumas," *Jurnal Unnes* 30 no. 2 (2011): 148-149.
- Badan Pusat Statistik. "Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2013 – 2017." *JatengBPS.go.id*. diakses pada 8 November 2022. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/28/2062/realisasi-pendapat-an-dan-belanja-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-menurut-kabupaten-kota-ribu-rupiah-2015---2019.html>
- BPK Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, "Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBN/APBD," Tulisan Hukum-UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh (2017). <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PENGATURAN-BANTUAN-PARTAI-POLITIK-YANG-BERSUMBER-DARI-APBN-APBD.pdf>
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Budiardjo. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 2003.
- Cahyaningtyas, Padma dkk. "Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 1950-1965." *Jurnal Candi* 20 no. 2 (2020):
- Diamond, Larry dan Leonardo Morlino. "The Quality of Democracy: An Overview." *Journal of Democracy* 15 no. 4 (2004): 25-26. doi:10.1353/jod.2004.0060.
- Eme, Okechukwu Innocent, and Nkechi Anyadike. "Political financing in Africa: A comparative study of Kenya and Nigeria: Proposal for reform." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, no. 27 P1 (2014): 22-22.
- Furqon, Moh. Tanzil. *Visi dan Misi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Perspektif Politik Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011.
- Geraldly, Galang. "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS," *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, no.2 (2019): 54-69.
- Harruma, Issha. "Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-Undang." *Kompas.com*. Diakses pada 6 November 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>

- Hastuti, Proborini. Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. (UPN Veteran Jawa Timur: Jawa Timur). (2018): 797 <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/293/147/>.
- Hinca. "Pendanaan Partai Politik", *Kompas.com*. Diakses Pada 6 November 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/19085981/pendanaan.partai.politik>.
- Humas Kemenko Polhukam RI. "Problematika Pendanaan Partai Politik dan Politik Berbiaya Mahal Mendorong Munculnya Politik Transaksional." *Polkam.go.id*. Diakses Pada 6 November 2022. <https://polkam.go.id/problematika-pendanaan-partai-politik-politik-berbiaya-mahal/>
- Humas, "Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus," *Penalaran UNM*, Diakses pada 6 November 2022, <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/#:~:text=Jenis%20pendekatan%20studi%20kasus%20ini,masalah%20yang%20diungkap%20dapat%20terselesaikan>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)," *setkab.go.id*, diakses pada 22 Agustus 2023, [https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/#:~:text=Undang%20Undang%20\(UU\)%20Nomor,Laoly%20pada%202016%20Agustus%202017](https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/#:~:text=Undang%20Undang%20(UU)%20Nomor,Laoly%20pada%202016%20Agustus%202017)
- Ibad, Ahsanul. *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik oleh Negara dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas (Studi dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta. 2017.
- Junaidi, Veri, dan Veri Junaidi. *Anomali keuangan partai politik: pengaturan dan praktek. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*, 2011. <http://perludem.org/wp-content/uploads/2012/02/Anomali-Keuangan-Partai-Politik.pdf>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Kemenkumham: Jakarta, 2011.
- Kyriacou, Andreas P. *Defining Accountability*, (Paper: Associate Professor of Economics, University of Girona: Spain, 2008.
- Lubis, Ibrahim. "Field Research (Penelitian Lapangan)." *anekamakalah.com*. Diakses pada 6 November 2022. <https://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>.
- Malik. "Kajian Konstitusional Independensi Dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi." *Kajian Konstitusional Independensi Dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi XV* no. 4 (2010): 364. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/60>

- Maryose, Heni. *Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma)*. Skripsi IAIN Bengkulu: Bengkulu, 2019.
- Mhum, Ni'matul Huda. *Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Skripsi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018.
- Muliana, Rizqi Yusuf. *Peran Komunitas Juang Sebagai Organisasi Sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) di Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2022.
- “PDIP Unggul di Banyumas, Disusul Golkar dan PKB.” *detiknews*. Diakses pada diakses pada 8 Nov 2022. <https://news.detik.com/berita/d-2561387/pdip-unggul-di-banyumas-disusul-golkar-dan-pkb>
- Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, No. 5. Jakarta.
- Pemerintah Kab. Banyumas. 2006. Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, No. 4. Banyumas.
- "Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBN/APBD." Tulisan Hukum-UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh (2017). <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PENGATURAN-BANTUAN-PARTAI-POLITIK-YANG-BERSUMBER-DARI-APBN-APBD.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. *Political Party Finance Reform in Southeast-Asia*. Perludem: Jakarta, 2021.
- Perludem. “Konversi Suara Menjadi Kursi.” (Siaran Pers Perludem, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)). (2014): 3 <http://perludem.org/wp-content/uploads/2016/10/Siaran-Pers-Konversi-Suara-Menjadi-Kursi.pdf>
- Prayitno, Budi. *Pelembagaan Politik PDIP Jateng*. Tesis Universitas Diponegoro: Semarang, 2009.
- Puspita, Meta Dyah dkk. *Isu Primordialisme Dan Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Studi Kegagalan Prabowo-Hatta Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kabupaten Banyumas)*. Artikel Universitas Diponegoro: Semarang, 2014.
- Radar Banyumas, “Bantuan Parpol di Banyumas, PDIP Banyumas Terbesar Rp 1031 Miliar, Terkecil Nasdem Rp 1547 Juta,” *Radar Banyumas*, diakses pada 21 Agustus 2023, <https://radarbanyumas.disway.id/read/19006/bantuan-parpol-di-banyumas-pdip-banyumas-terbesar-rp-1031-miliar-terkecil-nasdem-rp-1547-juta>

- Rakhman, Moh. Arief dan Hatta Abdi Muhammad. "Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan "PARTY-ID" Terhadap Partai Politik Baru 2019." *Journal of Politics and Policy* 1. no.2 (2019): 161-162.
- Ratnasari, Siska Ardiansyah dan Aliar Syam, "Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik," *Eksekusi: Journal of Law*, no. 1 (2022): 54-55.
- Rohmah, Shoma, Fajar. *Aktualisasi Visi Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus*. Skripsi Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2011.
- Rooseno. "Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta* (2014).
- Sandjaja, Utama, dkk. *Seri Demokrasi Elektoral, Buku 10: Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta, 2011.
- Satriawan, Iwan. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. UB Press: Malang, 2016.
- Setiawan, Wahyu. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang, 2012.
- Sumarwoto. "KPU Banyumas tetapkan 50 calon terpilih anggota DPRD." *Jateng, Antanews*. Diakses Pada 6 November 2022. <https://jateng.antaranews.com/berita/256246/kpu-banyumas-tetapkan-50-calon-terpilih-anggota-dprd>
- Susanto, Mei. "Model Alternatif Pendanaan Partai Politik." *Kajian* 22, no. 3 (2019): 221-240.
- Wahyu, Yohan dan Ignatius Kristanto, "Arena Pertaruhan "Nasionalis"," *Harian Kompas*, diakses pada 21 Agustus 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2009/03/12/08394165/arena-pertaruhan-nasionalis?page=all>
- Wandi, Sustiyo. "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang." *ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation* 2, no. 8 (2013). 524-535. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr/article/download/1792/1660>
- Widyananda, Rakha Fahreza. "7 Tujuan Partai Politik Menurut UU di Indonesia dan Kewajibannya, Anda Wajib Tahu," *Merdeka.com*. Diakses pada 6 November 2022. <https://www.merdeka.com/jatim/7-tujuan-partai-politik-menurut-uu-di-indonesia-dan-kewajibannya-anda-wajib-tahu-klm.html>.